

PENGUASAAN DAN MELUMPUHKAN PERLAWANAN POLITIK PAPUA ‘SOAL HAM DIATUR DARI BELAKANG’

Paralysing Papuan Political Resistance, Human Rights Regulated from Behind

Theo van den Broek

SKP-KC Fransiscans Papua
Email: theoedb44@gmail.com

ABSTRACT

In this reflection we describe the characteristics of the social situation in Papua at the end of 2022. The current situation is actually the result of the ‘security approach strategy’ pattern that has been implemented by the Indonesian government for the past 3 ½ years. The government hopes that with a “security approach” the conflict in Papua can be resolved. De facto, what was achieved: the implementation of the strategy resulted in the opposite situation, namely: the conflict was not resolved, but became much more complex and difficult to resolve. The security approach strategy turned out to be accompanied by an escalation of violence which not only threatened the physical lives of many citizens, but also had a very negative impact on a number of sectors of social life (including: the law enforcement sector, the freedom of expression and assembly sector, the democracy sector, and the population sector). . After 3 ½ years of embracing the security approach, it turns out that the people of Papua, in particular the indigenous Papuans, feel that they have been driven into a dead end. An atmosphere in which there is no more bright spot for a dignified solution to the problem. In order to pave the way towards a good and peaceful resolution of the problem, we need to [1] eliminate the negative impact of the 3 ½ year policy, and [2] the willingness of all parties to show a true ‘political will’ and open themselves to dialogue, including discussing political aspects which are actually the main root of problems in Papua.

Keywords: Domination, human rights, Papua, authoritarian state, law state.

ABSTRAK

Dalam refleksi ini kami menguraikan ciri-ciri situasi kemasyarakatan di Papua pada akhir 2022. Situasi dewasa ini sebenarnya adalah hasil dari pola ‘strategi pendekatan keamanan’ yang diterapkan Pemerintah Indonesia selama 3 ½ tahun terakhir ini. Harapan pemerintah, supaya dengan ‘pendekatan keamanan’ konflik di Papua dapat diselesaikan. De facto, yang tercapai: penerapan strategi itu menghasilkan situasi yang sebaliknya, yakni: konflik tidak diselesaikan, melainkan menjadi jauh lebih kompleks dan sulit diatasi. Strategi pendekatan keamanan ternyata disertai dengan suatu eskalasi kekerasan yang tidak saja mengancam hidup fisik banyak warga, namun juga mempunyai dampak sangat negatif atas sejumlah sektor hidup bermasyarakat (termasuk: sektor penerapan hukum, sektor kebebasan pengungkapan pendapat dan berkumpul, sektor demokrasi, dan sektor kependudukan). Setelah 3 ½ tahun mengungguli pendekatan keamanan, ternyata masyarakat Papua, secara khusus masyarakat asli Papua, merasa diantar memasuki jalan buntu. Suatu suasana di mana tidak ada titik terang lagi akan suatu penyelesaian permasalahannya secara bermartabat. Untuk membuka jalan menuju suatu penyelesaian permasalahan dengan baik dan damai, perlu kita [1] menghilangkan dampak negatif dari kebijakan selama 3 ½ tahun itu, dan [2] kesediaan semua pihak untuk menunjukkan suatu ‘political will’ yang betul dan membuka diri untuk berdialog, termasuk pembahasan aspek politik yang sebenarnya merupakan akar utama permasalahan di Papua.

Kata kunci: Penguasaan, Papua, HAM, negara hukum, negara kekuasaan

PENDAHULUAN

Kami diminta menulis suatu refleksi tahunan mengenai keadaan di Papua dalam tahun yang baru lalu 2022. Walau demikian dalam refleksi ini kami cenderung memperluas kurun waktu yang

direfleksikan, menjadi 2019-2022. Alasannya: keadaan selama tahun 2022 sulit dipahami kalau tidak dikaitkan dengan sejumlah perkembangan selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Dalam refleksi kami akan muncul suatu pola yang menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir ini suatu ‘grand design strategi penguasaan’ mulai

DOI:

Naskah Masuk:

Revisi akhir:

Diterima:

13



diterapkan secara sistematis. Titik awal adalah tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) akhir 2018 (pembunuhan 16 pekerja jalan di wilayah Nduga) serta ‘kerusuhan rasial’ yang diawali dengan insiden-insiden rasial di Jawa (Surabaya, Malang, Semarang) di mana orang Papua dinyatakan ‘monyet’ bulan Agustus 2019. Selanjutnya bukan konflik rasial - yang ternyata masih cukup hidup di Indonesia - ditangani, namun yang ditangani adalah perlawanan politik di Papua. Inti strateginya: menguasai Papua secara menyeluruh dan melumpuhkan segala perlawanan politik di Papua.

Suatu pendekatan keamanan yang tidak luput dari pemakaian kekerasan. ‘Kekerasan’ baik ‘kekerasan fisik’ maupun ‘kekerasan di sektor hukum yuridis’. Lantas pertanyaan, sejauh mana pendekatan keamanan disertai kekerasan dapat diterapkan?, secara tidak langsung terjawab melalui ungkapan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, yakni “aparatus keamanan menurunkan kekuatan penuh dan menumpas habis kelompok kriminal bersenjata”. Menurutnya, aparat keamanan tidak perlu ragu dan urusan hak asasi manusia (HAM) bisa dibicarakan belakangan (‘Ketua MPR Tumpas Habis’, 26 April 2021). Itulah ungkapan beliau sewaktu berkomentar atas pembunuhan terhadap Kepala BIN Papua (25/4/2021) yang tewas dalam serangan oleh TPNPB.

‘KEKERASAN SEGI LIMA’

Yang menyertai ‘strategi penguasaan’ adalah eskalasi pemakaian kekerasan. Dalam laporan oleh Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) (IPAC, 13 Juli 2022). tercatat bahwa dalam kurun waktu 2010-2017 insiden kekerasan di Papua berjumlah rata-rata 11 insiden per tahun. Dalam kurun waktu 2018-2021 jumlah ini menjadi rata-rata 52 per tahun. Jumlah korban meningkat drastis: dari 320 orang tewas antara 2010 dan 2021, 211 (66%) adalah dalam kurun waktu 2018-2021. Dari jumlah 211 yang tewas ini, 52 adalah anggota TNI-Polri, 34 anggota TPNPB, sedangkan 125 adalah warga sipil biasa. Selain yang meninggal dunia, ada jumlah besar orang yang terluka, dan tidak kurang dari 60.000

warga biasa meninggalkan kampung halamannya karena tidak merasa aman lagi di tempatnya karena pengoperasian militer yang berjalan. Maka, ada 60.000 orang Papua yang mengungsi di tanahnya sendiri.

Eskalasi ‘penguasaan disertai kekerasan’ bukan saja terdapat di bidang keamanan. Masyarakat Papua, secara khusus Orang Asli Papua (OAP), mengalami bahwa ‘strategi penguasaan disertai kekerasan’ sebenarnya mengenai segala aspek kehidupan sehari-hari di Papua. Masyarakat terjatuh dalam suatu lingkaran ‘penguasaan disertai kekerasan’ yang bersegi lima. ‘Penguasaan-Kekerasan’ terasa sekali dalam [1] bidang keamanan, [2] bidang hukum dan yuridis, [3] bidang institutional dan demokrasi, [4] bidang kependudukan, dan [5] bidang komunikasi dan informasi. Selanjutnya kami akan menguraikan secara singkat ke-lima segi itu.

[1] Penguasaan disertai Kekerasan di bidang keamanan

Sejak pertengahan 2019 (krisis rasial) Papua dibanjiri pasukan TNI-Polri secara sistematis dan terstruktur. Ribuan pasukan dikerahkan ke Papua; rata-rata 1.000 personel per bulan selama tiga setengah tahun terakhir ini. Pada awalnya mereka dipusatkan di Timika, pusat Kogabwilhan III. Alasan awal untuk mengerahkan pasukan ke Papua adalah gerakan protes anti rasisme. Namun jumlah yang dikirim dan cepatnya pengirimannya sebenarnya tidak proporsional dengan masalah protes rasial masyarakat. Apalagi gerakan protes isu rasial pada awalnya untuk sebagian besar secara damai saja; mengerahkan polisi setempat sebenarnya sudah dapat mencukupi. Hanya dalam tahap lanjut gerakan protes rasial - yang sangat beralasan - dimanfaatkan oleh ‘orang yang tidak dikenal’ (dan juga tidak pernah investigasi) menjadi anarkis. Secara khusus di Jayapura (29 Agustus 2019) dan Wamena (23 September 2019).

Kesannya, pasukan sudah lama disiapkan dan siap diberangkatkan saja. Tinggal tunggu momentum. Seakan-akan sudah ada ‘pegangan kebijakan’ (atau: blueprint strategi) dan semuanya dilaksanakan dengan rapi oleh Menkopolkam, Wiranto, bersama Kapolri, Tito Karnavian.

Walau dikerahkan ke Papua berkaitan dengan kerusuhan rasial, ternyata pada Desember 2019 konfrontasi dengan TPNPB dimulai dan/atau dicari, dan serangkaian wilayah konflik mulai muncul. Awalnya TNI-Polri mengirim pasukan ke wilayah Intan Jaya, dengan tujuan 'menjamin keamanan masyarakat selama perayaan Natal Tahun Baru'. Sebenarnya sampai saat itu Intan Jaya sama sekali tidak memiliki suatu sejarah konflik. Namun ternyata dijadikan wilayah konflik mulai Desember 2019. Lantas jumlah wilayah konflik terus bertambah: Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Yalimo, Mimika, Pegunungan Bintang, Kepulauan Yapen - semua daerah ini adalah dalam Provinsi Papua - dan wilayah Tambrau dan Teluk Bintuni di provinsi Papua Barat. Munculnya konflik di wilayah-wilayah tertentu, ternyata juga tidak lepas dari kepentingan ekonomis (akses pada sumber daya alam) bagi pihak-pihak tertentu, termasuk aparat (Rakhman, dkk., 2021).

Pada awalnya para pasukan non-organik komando dari Jakarta. Setelah Jenderal Andika Perkasa menjadi Pangdam TNI strategi sedikit berubah, sampai segala pasukan yang dikerahkan ke Papua dimasukkan dalam struktur teritorial yang sudah ada di Papua.¹ Dengan demikian menjadi 'pasukan organik', dan makin didekatkan dengan masyarakat, hingga dapat menunjukkan suatu pendekatan yang lebih 'humanis'. Strategi ini juga didukung dengan rencana pemekaran wilayah yang akan memperluas struktur militer teritorial melalui pembentukan provinsi-provinsi yang baru. Maka, kehadiran pasukan dalam jumlah besar bisa menjadi lebih permanen karena ditetapkan demi penugasan secara teritorial.

Sementara provokasi timbal balik antara TPNPB dan TNI-Polri berjalan terus. TPNPB menyatakan perang lawan TNI-Polri dan siapa saja yang berkaitan dengan strategi penguasaan oleh aparat ini. TPNPB juga memberikan peringatan kepada para warga, secara khusus 'warga non Papua' yang berada di wilayah konflik untuk meninggalkan wilayah medan perangnya. Korban-korban mulai jatuh. Bukan saja dalam kontak senjata langsung antara TPNPB dan

TNI-Polri, namun juga makin banyak dari antara warga kampung yang biasa saja. Mereka menjadi korban dari baik agresi TPNPB maupun agresi TNI-Polri, dan jumlah korban warga sipil makin melebihi jumlah korban di kalangan TPNPB dan TNI-Polri. Apalagi suasana konflik bersenjata ini mendorong masyarakat untuk meninggalkan kampung halamannya dengan segala miliknya, rumah, tanah, ternak dll. hingga menjadi pengungsi di tempat yang serba kekurangan. Jumlah pengungsi sudah mencapai angka 60.000 pada 2022.

[2] Penguasaan disertai kekerasan di bidang hukum dan yuridis

Yang dimaksudkan adalah a.l. kekerasan yang dialami melalui penangkapan tokoh-tokoh perlawanan politik secara sewenang-wenangnya. Salah satu buktinya adalah penangkapan sejumlah tokoh pimpinan perlawanan politik sesuai protes rasial. Tanpa suatu investigasi yang memadai, mereka ditangkap. Waktu itu Kapolri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa daftar semua tersangka sudah di kantongnya, sebelum suatu investigasi yang wajar diadakan. Bukan pada saat itu saja. Masih sekarang ini kelompok aktivis seperti KNPB dituduh dengan sangat mudah sebagai pelaku 'insiden-insiden' mana pun tanpa keterlibatannya dibuktikan. Akibatnya sebenarnya tragis: misalkan dalam Kasus Kisor (Sept 2021) semua pemimpin KNPB di wilayah Tambrau-Sorong dinyatakan tersangka dan dapat ditangkap saja. Gaya 'kesewenangan' dan 'kriminalisasi' cukup nyata. Apalagi kalau kita melihat nasibnya sekitar 80 orang Papua yang dinyatakan 'tersangka makar' sesuai gerakan protes anti rasial. Dalam proses di pengadilan akhirnya para hakim perlu mengakui bahwa para 'tersangka makar' sebenarnya tidak terbukti salah. Namun demikian, diberikan hukuman. Divonis dipenjarakan kurang lebih sama panjangnya dengan waktu yang mereka sudah ditahan (sekitar 8 sampai 11 bulan). Dengan memberikan hukuman itu, pihak pengadilan dapat menghindari bahwa para tahanan dapat mengklaim ganti rugi dari negara karena ditahan tanpa dasar yang wajar ('The murky fate', 21 November 2022).

¹ Hanya satu unit dikecualikan, yakni: Unit *Operasi Cartenz Damai*, yang beroperasi dari Timika, dan berjumlah 1.925 anggota Polri dan 101 prajurit TNI.

‘Kekerasan hukum dan yuridis’ juga terungkap secara nyata dalam sikap kepolisian, aparat keamanan, yang tidak memberikan ruang sedikit pun pada para aktivis yang ingin mengunjuk rasa. Hak kebebasan berpendapat sama sekali tidak diindahkan lagi, dan penyangkalan hak itu sudah menjadi standar untuk setiap ‘perkumpulan yang mau beraksi damai’. Perkumpulan protes mana pun akan dibubarkan secara paksa. Lazimnya disertai penangkapan sejumlah orang dan melukai lebih banyak lagi. Akhir ini juga pola penindasan dilengkapi dengan pemakaian gas air mata sebagai peralatan tindakan standar. Sementara waktu, peraturan yang menyatakan bahwa setiap aksi secara damai hanya perlu dilaporkan kepada pihak keamanan, ternyata diabaikan. Menurut peraturan itu tidak perlu ada izin, hanya melapor saja. Nuansa dalam hal ini sudah lama hilang dan secara rutin gerakan apa saja ‘tidak diberikan izin’, hingga dibubarkan. Hak kebebasan pendapat yang terjamin dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara ternyata sudah tidak berlaku lagi di Papua.

‘Kekerasan hukum dan yuridis’ bukan saja berkaitan dengan kebebasan pendapat, namun, misalkan, juga berdampak pada pengakuan akan ‘hak milik tradisional’ masyarakat asli atas tanahnya, atau akan hak untuk menolak investor masuk wilayahnya atau untuk menolak perampasan tanahnya. Antara lain, pengesahan “Omnibus Law” (UU Cipta Kerja) adalah salah satu sarana yang melegitimasi kemudahan pemakaian ‘kekerasan hukum dan yuridis’ seperti dimaksudkan di atas. Maka, bukan saja hak masyarakat adat disangkal, melainkan malahan masyarakat adat dirampas jaminan makanannya dan hak hidupnya. Marginalisasi masyarakat adat karena prioritas yang diberikan kepada ‘hak investor’ makin mewarnai gaya pembangunan di Papua dewasa ini. Dan walau Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat hukum hingga dinilai ‘inkonstitusional bersyarat’, penerapan UU Cipta Kerja tetap[dijalankan. Malahan akhir ini (31/12) dipaksakan lagi melalui suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perppu) oleh

Presiden yang sebenarnya melanggar hukum (‘Akal bulus Perpu Omnibus,’ 8 Januari 2023).²

‘Penguasaan disertai kekerasan’ juga tercermin dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua ini. Banyak kasus sama sekali tidak ditindaklanjuti atau ditunda-tunda saja. Sedangkan kasus pelanggaran HAM Berat yang ditangani, seperti kasus Paniai (2014), dijadikan semacam sandiwara dimana keadilan tidak dicari namun dinodai secara luar biasa. Kasus Paniai yang melibatkan sejumlah pelaku, yang sudah diidentifikasi oleh Komnas HAM, akhirnya disidangkan dengan menetapkan hanya satu yang menjadi tersangka, dan yang satu ini akhirnya dinyatakan bebas karena tidak bersalah! Suatu pukulan luar biasa, bukan saja bagi keluarga korban pelanggaran HAM Berat itu, namun juga untuk siapa saja yang masih mengharapkan bahwa negara akan menjamin penerapan hukum dengan benar dan keadilan diberikan. Perlahan-lahan kami di Papua mulai merasa bahwa Indonesia sudah tidak lagi berjalan sebagai ‘negara hukum’, melainkan sebagai ‘negara penguasaan’.

[3] Penguasaan disertai kekerasan di bidang institusi dan demokrasi

Mulai tahun 2020 ke atas ‘strategi penguasaan’ mulai ditemani oleh ‘kekerasan administratif-institusional’. Yang dimaksudkan: perubahan secara administratif, secara khusus melalui Revisi Otonomi Khusus dan Rencana Daerah Otonom Baru (DOB). Baik Otsus Jilid II maupun DOB ditetapkan dengan menyangkal segala bentuk partisipasi, hak bersuara, dan protes masyarakat yang luas. Memang sangat keluarbiasaan bagaimana suatu ‘proses legitimasi penguasaan sepihak’ – rencana DOB de facto sudah diputuskan oleh segelintir pejabat tanggal 11 September 2020 - perlahan-lahan tercapai melalui suatu ‘power play’ sejumlah orang yang berkuasa (‘Makhfud MD: Papua,; 11 Septembr

² Berkaitan dengan penerbitan Perppu UU Cipta Kerja, dalam opini yang diterbitkan dalam majalah Tempo (8 Januari 2023), digambarkan bahwa tindakan demikian makin menunjukkan bahwa di Indonesia mulai diterapkan ‘legalisme otokratik’. Istilah in merujuk pada tindakan mengkonsolidasikan kekuasaan lewat sejumlah cara yang seolah-olah legal padahal secara esensial mencederai demokrasi dan konstitusi, termasuk ihwal pembatasan kekuasaan.

2020). Mungkin mereka juga dibantu karena para politisi di pemerintah pusat kelihatan lebih sibuk dengan 'pemilu Presiden 2024' daripada dengan masalah politik yang serius di Papua.

Dalam proses ini seluruh protes masyarakat luas terhadap Otsus Jilid II dan Rencana DOB masyarakat luas ditolak dan ditindak dengan kekerasan yang nyata. Seluruh proses legitimasi dijalankan dan ditampung tanpa mengadakan evaluasi yang layak mengenai 20 tahun pengalaman berlakunya Otsus. Malahan Majelis Rakyat Papua (MRP) sewaktu mereka ingin mengadakan pertemuan evaluasi dengan rakyat guna mendengar pendapatnya, MRP dihalangi instansi tertentu yang didukung aparat, hingga tidak jadi pertemuan evaluasi ('Terindikasi makar,' 17 November 2020).

Secara khusus berhubungan dengan penetapan program pemekaran, para penguasa juga tidak mengindahkan adanya 'moratorium pemekaran' sejak 2014. Moratorium itu ada karena dari evaluasi seluruh program pemekaran di Indonesia ternyata menjadi jelas bahwa hanya 24% dapat dinyatakan berhasil. 76% gagal! Maka, pola pemekaran perlu dipikirkan ulang dan menghasilkan suatu konsep pemekaran yang baru supaya lebih tepat dan berpotensi berhasil. Dalam proses penetapan DOB di Papua sekarang ini peringatan tadi sama sekali tidak dihiraukan. Juga tidak diberikan perhatian sewajarnya -sebenarnya persyaratan mutlak - pada penelitian persiapan, assessment peluang kemandirian dan segala macam faktor yang akan menentukan berhasil-gagal pemekaran itu. Semua persyaratan itu tidak dihiraukan dan ditutup berburu-buru oleh Komisi II DPR RI. Malahan argumen-argumen yang sangat masuk di akal dan yang disampaikan pihak-pihak yang kompeten, seperti akademisi, diabaikan seakan hanya bersifat 'sampah yang mengganggu'.³

3 Bandingkan misalnya segala data yang disajikan oleh Dr. Agus Sumule, sewaktu beliau mengambil bagian dalam diskusi selama webinar yang diselenggarakan BRIN pada 29 Desember 2022. PPTnya berjudul *DOB di Papua: Apa Kata Statistik dan Implikasinya ke Depan (agussumule@gmail.com)*. Berdasarkan data-data resmi mengenai Pendidikan, Penduduk dan Kemiskinan, IPM, Kapasitas Fiskal Provinsi, beliau menunjukkan bahwa a.l. "marginalisasi OAP akan semakin intens –

Memang sangat mengganggu untuk menyadari bahwa pola kebijakan kunci (Otsus dan DOB) dapat ditetapkan dan dilegitimasi tanpa suatu evaluasi yang layak mengenai 20 tahun pengalaman Otsus, dan tanpa mengikuti pedoman persyaratan demi penetapan unit administratif yang kelayakan. Untuk Papua ternyata 'dibuat pengecualian' tanpa pikir lama, sampai memang kebijakan ditetapkan saja dengan mengikuti 'kepentingan politik tertentu' saja. Suatu gaya penentuan policy negara yang sangat kontras dengan cara bicara para tokoh penentu policy, dimana 'peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua' selalu diangkat sebagai prioritas utama. Ternyata: kata-kata murah saja.

Sementara, de facto, sesuai ungkapan dari Tito Karnavian, pemekaran didasarkan "Informasi BIN". Maka, pemekaran di Papua satu tujuan saja: penguasaan wilayah. Proses 'kekerasan administratif' ini juga menunjukkan bahwa di tingkat nasional Indonesia semangat demokratis sudah sangat menurun dan lembaga seperti DPR RI sudah kehilangan bobot dalam 'fungsi sebagai perwakilan rakyat'. Semuanya 'diarahkan' saja demi pencapaian suatu 'legitimasi resmi'.

Dampak lainnya dari 'strategi penguasaan disertai kekerasan' adalah kehilangan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan secara otonom. Dengan adanya 'pendekatan keamanan' secara dominan, sudah tentu Pemerintah Daerah pun tidak dapat bergerak tanpa menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan yang de facto ditetapkan oleh aparat keamanan. Apalagi peranan BIN dalam menetapkan strategi setempat tidak dapat diabaikan. Kemudian tambah lagi hasil Revisi UU Otsus. Dalam Otsus Jilid II ruang otonom buat Pemerintah Daerah sudah dibatasi secara sangat signifikan, alias tidak berarti lagi (IPAC, 2021). Apalagi Revisi UU Otsus dilengkapi dengan pembentukan suatu Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang diketuai Wakil Presiden, dan anggotanya untuk 90% lebih dari pelbagai kementerian di Jakarta. Pemerintah di Papua tinggal menerima instruksi saja dan memastikan bahwa kebijakan yang ditentukan

bahkan bukan tidak mungkin berujung pada *creeping genocide*". *Cita-Cita DOB bisa tidak terwujud*.

di Jakarta dilaksanakan. Akibat perkembangan itu, Pemerintah Daerah makin menunjukkan suatu sikap lesu hingga ‘tunggu-tunggu saja’ dan ‘ikut-ikutan saja’.

[4] penguasaan disertai kekerasan di bidang kependudukan

Menurut sensus kependudukan 2022, penduduk di Papua mencapai jumlah 5,437.779 orang. Provinsi Papua (bentuk lama) 4.303.707 sedangkan Provinsi Papua Barat (bentuk lama) 1.134.068. Walau data mengenai susunan kependudukan dari sudut ‘asli Papua’ dan ‘non asli Papua’ tidak tersedia, memang bukan rahasia lagi bahwa jumlah Orang Asli Papua (OAP) sudah menjadi suatu minoritas yang signifikan di tanahnya sendiri. Juga cukup jelas bahwa kebanyakan penduduk OAP tinggal di wilayah Pegunungan dan wilayah Pantai non-urban. Di situlah penduduk OAP masih merupakan suatu mayoritas yang nyata. Sebaliknya di wilayah perkotaan, pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, susunan demografis sudah berubah drastis; di situlah penduduk OAP ada dalam posisi minoritas yang sangat nyata. Kota seperti Jayapura, Merauke, Sorong, Timika, Fakfak, Nabire sudah jelas menunjukkan suatu kemajemukan yang menonjol, dimana persentase penduduk OAP nyaris mencapai antara 20 dan 30%.

Perubahan demografis ini adalah hasil suatu arus migrasi penduduk dari wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Arus migrasi ini pernah didorong secara aktif (zaman Suharto: program transmigrasi) dan kemudian berjalan terus (migrasi spontan) dan tidak pernah dikendalikan. Dampaknya sudah dialami sejak lama, secara khusus di bidang ekonomi, perdagangan dan politik. Sektor-sektor ini sangat dikuasai para migran, dan kehadiran para migran juga makin hari makin tidak kalah menguasai lembaga-lembaga pemerintahan. Sebagai salah satu indikator saja, bandingkan quota OAP dengan quota non-OAP sebagai anggota DPRP/D di sejumlah wilayah di Papua di bawah ini (Tabel 1):

Artinya: segala kebijakan pemerintahan di Papua makin hari sangat kurang ditentukan oleh ‘suara orang asli Papua’. Berulang kali perhatian ditarik pada pola pembangunan, yang sangat mengandalkan arus migran tadi, hingga menciptakan suatu marginalisasi masyarakat adat Papua, baik secara ekonomis maupun secara politik. Apalagi mayoritas OAP masih hidup di wilayah-wilayah yang diketahui kaya sumber daya alam, hingga diminati para investor, para pedagang dan segala pihak yang mencari keuntungannya. Perlu dicatat bahwa justru wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam dan sekaligus penduduknya mayoritas OAP selama tahun-tahun terakhir ini diubah statusnya, yakni: menjadi wilayah-wilayah konflik, hingga makin dikuasai aparat keamanan.

Dampak migrasi serta perubahan drastis susunan demografis ini masih akan mendapat suatu dorongan khusus lagi melalui program pembentukan empat sampai lima atau enam provinsi yang baru. Pembentukan provinsi-provinsi baru akan membutuhkan segala macam fasilitas, konstruksi baru dan juga tenaga kerja yang berkualitas untuk mengisi segala kursi di pemerintahan. Kenyataan ini akan menarik sangat banyak migran. Tidak ada mekanisme yang berlaku untuk mengendalikan masuknya para migran ini dan melindungi hak hidup masyarakat adat. Maka, dari segi marginalisasi masyarakat adat Papua pembentukan DOB yang baru merupakan suatu musibah yang luar biasa. Semua penentu kebijakan di pemerintah pusat bisa menyadari akibat itu. De facto pertimbangan-pertimbangan semacam tadi tidak diberikan tempat dalam proses penetapan UU DOB tahun 2022 ini. Entah kenapa?

[5] Penguasaan disertai kekerasan di bidang komunikasi dan informasi

Salah satu faktor yang sangat berperan dalam pola perkembangan di Papua adalah sejauh mana informasi yang tepat mengenai apa yang terjadi di Papua dibiarkan menjadi ketahuan kalangan masyarakat yang luas. Masyarakat luas di Indonesia lazimnya tidak tahu banyak mengenai Papua. Sedikit saja diketahui. Dan yang ‘sedikit itu’ sering diwarnai stereotip-stereotip seperti

Tabel 1. Keanggotaan DPRD Papua berdasarkan status kependudukan

NO	KEANGGOTAAN DPR NAMA REGENCY/KOTA	JUMLAH ANGGOTA	ORANG ASLI PAPUA	ORANG PENDATANG
1	Sarmi	20	7	13
2	Boven Digoel	20	6	16
3	Asmat	25	14	11
4	Mimika	35	18	17
5	Fakfak	20	8	12
6	Raja Ampat	20	9	11
7	Sorong	25	6	19
8	Teluk Wondama	25	11	14
9	Merauke	30	3	27
10	Sorong Selatan	20	3	17
11	Kota Jayapura	40	13	27
12	Keerom	20	7	13
13	Kabupaten Jayapura	25	7	18
14	DPR Provinsi Papua	55	44	11
15	DPR Provinsi Papua Barat	45	17	28

‘wilayah dan orang yang terbelakang’ disertai penilaian bobot kemanusiaannya yang kurang dapat dibanggakan. Dalam ungkapan ekstrem, seperti selama insiden-insiden rasial Agustus 2019, segala martabat kemanusiaan disangkal, atau dinilai sangat rendah. Apalagi, sejak sejumlah pejuang ‘pembebasan dari penindasan’ memilih untuk mencari perhatian lebih serius dengan memakai kekerasan, para pejuang di Papua dikategorikan sebagai ‘teroris’ (2021).

Inilah hasil ‘stigmatisasi’ yang bertahun-tahun berjalan dan tidak pernah dapat dilawan. Dengan adanya sarana komunikasi yang lebih canggih dewasa ini masyarakat luas bisa dapat akses pada banyak sumber informasi yang berbeda. Namun sarana yang canggih itu juga masih dipakai secara sistematis dan terstruktur oleh organisasi-organisasi kenegaraan yang menyelenggarakan kampanye untuk menyajikan informasi yang kurang tepat atau kurang lengkap (‘Open season’, 3 Agustus 2021) . Maka proses stigmatisasi berjalan terus. Stigmatisasi ini juga dilengkapi dengan suatu upaya untuk membuat para konsumen dapat percaya bahwa di Papua sebenarnya tidak ada masalah. Atau, sekurang-

kurangnya, bahwa pemerintah telah berusaha sangat luar biasa untuk mengembangkan wilayah itu – menyalurkan anggaran banyak sekali - sambil mengindahkan segala hak kemanusiaan. Kampanye sejenis ini sekali-kali ditemukan para ‘pemantau komunikasi’. Sudah tentu kampanye mis-informasi mengenai Papua sebagaimana dilaporkan Universitas Harvard (USA) belum lama ini (‘A pro government disinformation,’ 19 Oktober 2022), mempunyai dampak negatif sekali dan mengaburkan pemahaman mengenai konflik di Papua yang sebenarnya.

Kenyataan demikian juga mulai mendorong lembaga seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengalamatkan pertanyaan-pertanyaan kepada Indonesia dengan lebih frekuen dan jelas. Akhir 2021 PBB meminta Indonesia untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sangat konkret (‘PBB surati RI,’ 12 februari 2022). Karena kurang ditanggapi oleh pihak yang berwajib, PBB malahan memilih untuk membuka luas pertanyaan-pertanyaan PBB kepada Indonesia, sehingga seluruh komunitas internasional dapat mengetahuinya. Juga sekitar proses Universal Periodic Review (UPR) oleh

Komisi Tinggi HAM PBB, bulan Oktober 2022, sejumlah lembaga internasional mengeluh terus mengenai ketidakbenaran banyak informasi yang secara resmi disajikan oleh Indonesia kepada forum internasional ('Menolak Klaim Pemerinta,' 11 Novemembr 2022). Dalam konteks yang sama, berulang kali diminta supaya Rappporteur Khusus HAM PBB diizinkan oleh Indonesia untuk mengunjungi Papua. Permintaan demikian sampai saat ini secara formal diterima oleh Indonesia, namun pelaksanaannya efektifnya dihalangi terus-menerus oleh Indonesia. Sudah bertahun-tahun akses bebas bagi para wartawan pun, nasional maupun internasional, dipersulit sampai de facto tidak diizinkan. Entah kenapa?

Berhubungan dengan soal informasi keluar, selama masa panas seusai insiden-insiden rasial Agustus 2019, akses pada internet di Papua diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Tindakan ini tidak dibenarkan oleh tim hakim sewaktu kasus ini disidangkan di pengadilan di Jakarta. Mereka berpendapat bahwa Presiden dan Menkominfo betul bersalah. Namun dalam proses 'naik banding' oleh Menkominfo keputusan diubah lagi, dan seakan-akan dalam hal tertentu tindakan demikian dapat dijalankan. Sekali lagi suatu tanda yang sangat memprihatinkan.

DAMPAK ATAS KEHIDUPAN PAPUA

Perkembangan sebagaimana digambarkan di atas mempunyai suatu dampak besar pada kehidupan sehari-hari di Papua. Imbas dari 'strategi penguasaan total dan melumpuhkan para lawan politik' itu beraneka ragam bentuknya. Beberapa aspek pokok kami angkat di bawah ini:

[1] Peranan pemerintah sipil hilang

Pertama-tama dampak besar dapat dirasakan di tingkat penentuan kebijakan di Papua. Pihak yang menentukan segala macam kebijakan di Papua, bukan pemerintah provinsi atau lembaga DPRP, namun pemerintah pusat serta lembaga-lembaganya. Pemerintah sipil di Papua kelihatan tidak berfungsi, tidak ada kegiatan inovatif yang menonjol atau program-program pelayanan umum

yang betul menjawab kebutuhan masyarakat luas. Yang paling menonjol bahwa dalam pembahasan kebijakan ternyata pihak keamanan (TNI-Polri) lebih menentukan dan mengatur kehidupan sehari-hari para warga di Papua. Kesan nya bahwa semua mesti pertanggungjawaban kepada 'pihak keamanan', dan bukan kepada Gubernur dan jawatan nya.

Pola pemerintahan demikian masih diperkuat oleh peranan aparat BIN yang sejak beberapa tahun terakhir ini sangat mempengaruhi serta turut mengatur aktif kebijakan di Papua. Mereka malahan tidak ragu-ragu untuk mempromosikan dan mengandalkan organisasi-organisasi yang dikenali sebagai 'radikal nasionalis' (a.l. Barisan Merah Putih) guna mengendalikan arah berpolitik di Papua. Mereka tidak ragu-ragu menghindari Lembaga Kenegaraan lainnya, seperti misalnya MRP, untuk menjalankan tugasnya. Hal seperti itu sangat terlihat sewaktu serangkaian pertemuan evaluasi, secara khusus di Wamena dan Merauke (November 2021). Peranan BIN juga sangat nyata, mengingat bahwa keputusan untuk mengadakan pemekaran dilandaskan atas info BIN melulu, dan bukan atas penelitian yang berbobot mengenai peluang kemandirian suatu wilayah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

[2] Masyarakat bingung dan terpolarisasi

Selanjutnya dapat dicatat bahwa masyarakat umum makin bingung dengan keadaan sebagaimana adanya. Kami semua, sampai di pelosok-pelosok, menjadi penonton di pinggir jalan, dan malahan bisa begitu saja menjadi korban suatu 'strategi penyelesaian konflik' yang tidak menyelesaikan apa-apa. Itulah menakutkan, dan membuat banyak warga bertanya: bagaimana besok lagi? Jumlah warga yang menjadi korban sudah terlalu banyak, termasuk 60.000 warga yang terpaksa mengungsi, meninggalkan kampung serta jaminan makanannya. Bagaimana besok lagi? Bisa lari ke siapa?

Sudah tentu bahwa kenyataan demikian paling dirasakan di wilayah konflik sendiri, dan mengena baik warga OAP maupun warga

non-OAP. Namun demikian kebingungan tidak terbatas pada wilayah konflik saja. Juga di wilayah perkotaan jauh dari wilayah konflik, dampak 'penguasaan disertai kekerasan' sangat terasa dalam bentuk kehilangan hak kebebasan opini dan pendapat, kebebasan berkumpul dan dalam bentuk keramahan kemudahan kriminalisasi orang atau organisasi tertentu. Apalagi mulai terasa adanya bahaya polarisasi serta ancaman konflik horizontal.

Mungkin saja bagi seorang pemantau yang kurang mengetahui mengenai apa yang terjadi di Papua dewasa ini, kota-kota yang dikunjunginya kelihatan sangat tenang dan ramah saja. Tak terasa ada konflik yang serius. Kota-kota memperlihatkan lalulintas yang ramai, pertokoan banyak sekali, perdagangan berjalan, dan tidak ada insiden yang dilihat oleh seorang sepintas lalu. Kemungkinan besar juga para pribadi orang atau pun pihak yang memiliki kepentingan ekonomis dan kedudukan tertentu, menilai perkembangan selama ini lain daripada pribadi orang atau pihak yang rajin mengikuti perkembangan di Papua baik dekat maupun jauh dari rumahnya. Penilaian seorang yang berjuang demi suatu kehidupan bersama yang ditandai keadilan yang betul dan nilai-nilai luhur, sudah tentu akan menilai perkembangan di Papua sebagai sangat memprihatinkan. Tolok ukurnya: sama harganya martabat setiap manusia, kebenaran, kejujuran, keadilan, respek, kebersamaan, damai.

[3] hidup dalam ketidaknyamanan

Sebenarnya kebingungan masyarakat cukup besar karena merasa kehidupan yang tidak nyaman. Apalagi selama tahun 2022 ini kita semua dikagetkan bahwa kekerasan bisa berkembang sampai pembunuhan yang melampaui segala rasa perikemanusiaan, seperti terjadi di Timika bulan Agustus 2022. Empat orang dimutilasi, dibunuh dan dipotong dan dalam suatu karung dibuang di sungai. Kejadian demikian membuat kita berhenti di tempat serta terbungkam seribu bahasa. Apa yang terjadi di sini? Dan bagaimana mungkin hal demikian bisa terjadi? Lebih memprihatinkan lagi sewaktu Komnas HAM setelah meneliti kasus Timika ini menyatakan bahwa "mereka berkesan kuat bahwa ini bukan pertama kali pembunuhan

sejenis ini dilakukan oleh para pelaku yang diperiksa" ('Komnas HAM Duga,' 20 Septemembr 2022). Kesimpulan ini sangat menakutkan. Bukan saja di Timika, pembunuhan sejenis ini terjadi di tempat lain juga. Pembunuhan oleh TNI melalui penganiayaan di Mappi tidak jauh berbeda (31/8/2022); atau pembunuhan oleh TPNPB terhadap 8 pekerja telekomunikasi di Beoga, distrik Ilaga (2/3/2022); atau oleh TPNPB terhadap 10 warga sipil di Nogodaid, Kab Nduga (16/7/2022); atau terhadap 4 pekerja di Jalan Trans di Maskona Barat, Kab Teluk Bintuni (29/9/2022); atau penganiayaan terhadap tiga anak oleh TNI di Kerom (8/11/2022). Inilah Papua/Indonesia anno 2022! Dapat mengharapakan siapa untuk melindungi masyarakat? Lazimnya Gubernur diam, dan lembaga seperti DPRP dan MRP 'seakan-akan selalu ber-reses dan tidak aktif', terkecuali satu dua anggotanya.

[4] lembaga-lembaga tidak berdaya

Masyarakat nlazimnya mengharapakan lembaga-lembaga untuk membantu, namun ternyata dari DPRD sampai Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat atau Lembaga Swadaya Masyarakat, juga tidak membawa ketenangan yang memadai. Makin banyak lembaga memberikan kesan bahwa sendiri juga tidak tahu lagi mau merespons bagaimana? DPRD lazimnya diam saja, dan mencari kesibukan dalam hal-hal yang formal dan seremonial, namun yang tidak membawa efek perbaikan. Majelis Rakyat Papua (MRP) masih vokal, namun ternyata bukan lembaga yang punyai kuasa, sehingga mudah dipertainkan saja, menjadi 'hiasan demokrasi'. Lembaga-lembaga keagamaan/gereja untuk sebagian masih vokal, namun sekaligus menunjukkan suatu kemenduaan 'berpihak sini dan sana'. Malahan suatu polarisasi antar lembaga atau antar anggota dalam lembaga makin terlihat juga. Polarisasi, pro dan kontra, makin memperlemah dan melumpuhkan kekuatan lembaga-lembaga sipil, termasuk keagamaan. Ada polarisasi etnis, ada polarisasi keagamaan, ada polarisasi antar warga (elite – masyarakat biasa), ada polarisasi pro dan kontra perjuangan pembebasan, ada polarisasi pro dan kontra Otsus dan DOB. Disamping itu kesannya bahwa

setiap lembaga cenderung bertindak dan bersuara tersendiri dan kurang menunjukkan suatu keinginan untuk bergabung demi memperkuat suaranya demi perbaikan situasi di Papua ini.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM-LSM) pada umumnya masih berupaya untuk merespons pada situasi yang sedang berkembang. Namun mereka pun sangat mengalami keterbatasannya, dan suaranya mudah diabaikan saja. Yang paling menonjol adalah LSM-LSM yang bergerak di bidang pengadilan. Selama tahun-tahun terakhir ini mereka yang sangat aktif dan mencari menyatukan kekuatannya untuk ‘lawan arus’ demi mencapai keadilan buat masyarakat yang tak bersuara. Mereka juga sekali-sekali bekerjasama dengan jaringan ‘bantuan hukum’ di luar Papua, baik nasional (a.l. YLBHI, Kontras, Haris Azhar) maupun internasional (a.l. Amnesty, Tapol). Sejumlah LSM di Papua yang bergerak di bidang lingkungan juga cukup bersuara, karena dapat bantuan dari jaringan LSM dari luar Papua, (a.l. Mongabay, Walhi, Greenpeace, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat) yang sangat berkompeten dan berkapasitas, sehingga lebih mudah bersuara di tingkat lokal maupun nasional. Walau bekerja sesuai kemampuannya dan dengan dedikasi tinggi, ‘dunia LSM’ belum berhasil pun untuk mendorong para penguasa untuk banting stir nya. Malahan berisiko untuk dikriminalisasi (contoh: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti). Maka, ‘rasa tidak berdaya’ juga sering menjadi teman kerja para LSM.

[5] prioritas pola peningkatan ekonomi yang tak berpihak masyarakat adat

Segala kebingungan yang tadi digambarkan juga tidak lepas dari penentuan prioritas politik yang dipertunjukkan pemerintah pimpinan Jokowi dewasa ini. Yang paling menonjol adalah prioritas yang diberikan kepada ‘pengembangan ekonomi’ di atas segala apa. Ekonomi adalah nomor satu. Pilihan prioritas ekonomi ini mengakibatkan bahwa segala gerakan investor didorong secara khusus dan dipermudah. Kemudahan itu, a.l. melalui UU Cipta Kerja/Omnibus Law, yang justru mengurangi peluang masyarakat lokal untuk melindungi diri dan menjaga supaya mereka punya ‘jaminan makanan secara

traditional’ tetap ada. Kemudahan investasi sering bertabrakan dengan kepentingan masyarakat lokal dan bertabrakan dengan kemutlakan untuk melindungi lingkungan. Apalagi dalam gerakan protes melawan perampasan tanah dan deforestasi, masyarakat sering berhadapan dengan aparat keamanan, sehingga kalah dan malahan bisa dipersalahkan atau menjadi korban kekerasan.

Dalam kerangka ini juga tidak mengherankan bahwa telah berulang kali terangkat bahwa di belakang operasi aparat keamanan sekali-kali tersembunyi kepentingan lainnya, yakni kepentingan ekonomis. Bandingkan saja pelaporan sekitar gunung emas (Blok Wabu) di wilayah Intan Jaya, dan bagaimana para pelapor akhirnya dibawa ke pengadilan (kriminalisasi) karena mengkritik pemerintah serta pihak keamanan. Atau kenyataan bahwa tindak sah di tingkat Kabupaten dapat dibatal lagi di tingkat pengadilan lebih tinggi. Contohnya: Bupati Kabupaten Sorong, sejalan dengan kebijakan Presiden, mencabut izin beroperasi sejumlah perusahaan ‘kelapa sawit’. Perusahaan menggugat Bupati di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jayapura. Hakim PTUN memutuskan bahwa tindakan Bupati sah, dan perusahaan perlu tunduk padanya. Namun keputusan Bupati yang sah itu lagi dibatalkan oleh PTUN di Makasar dalam proses naik banding oleh perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana masyarakat tidak naik pitam dan merasa putus asa mengalami ketidakadilan serupa ini terus menerus. Sementara deforestasi berjalan terus dan hal demikian makin menghasilkan marginalisasi masyarakat lokal.

Imbas pendekatan penguasaan dikawinkan dengan prioritas ekonomi melulu adalah: terciptanya suatu suasana penuh ketidakadilan, kekerasan, dan penyangkalan martabat masyarakat Papua. Dan kelihatan ‘Jakarta’ tidak pusing!

[6] pelanggaran HAM disertai impunitas

Suasana kehidupan di Papua juga dipengaruhi oleh kekurangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM Berat. Keraguan akan pengadilan yang sudah lama diperlihatkan oleh masyarakat, pada

akhir tahun 2022 sekali lagi diperkuat karena persidangan berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM Berat di Paniai (2014). Persidangan baru ini dijalankan di Pengadilan HAM di Makasar. Kesimpulannya: persidangan itu suatu sandiwara yang sama sekali tidak mencari keadilan, hingga juga tidak membawa perasaan bahwa 'keadilan terjadi'. Dalam kasus Paniai ini, kenyataan demikian dipahami para kerabat dari korban-korban yang sederhana, maka mereka menolak hadir dalam prosesnya.

Hal yang sama juga dapat terbaca dari lambatnya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM yang sangat serius selama tahun-tahun terakhir ini. Antara lain, pembunuhan terhadap Pendeta Yeremias di Intan Jaya (sept '20), yang kasusnya sudah diselidiki oleh pelbagai Tim Pencarian Fakta. Secara garis besar semua tim sepaham bahwa pendeta Yeremias dibunuh oleh aparat dan nama pelaku cukup diketahui. Sampai saat ini proses pengadilan tidak diselesaikan.

Sekarang Pemerintah telah memutuskan untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM Berat dengan cara non-yudisial. Sasarannya, supaya semua kasus yang sudah lama tidak diselesaikan, akhirnya rampung ditangani pada akhir tahun 2022. Dalam dokumen resmi penetapan program penyelesaian secara non-yudisial dijelaskan oleh pemerintah bahwa fokus dalam penyelesaian adalah pada keluarga, kerabat para korban. Sedangkan para pelaku tidak menjadi fokusnya, dan dapat dikesampingkan; sekali lagi mereka berjalan bebas saja (Kepres 17/2022, 2022). Keluarga besar para korban sudah menolak penyelesaian semacam itu. Memang, keluarga besar korban kasus Wasior mengajukan serangkaian tuntutan kompensasi, namun juga berpendapat bahwa keadilan kurang diberikan. Kesannya, segala penyelesaian akhir-akhir ini – suatu proses yang sangat berburu-buru - hanya untuk menenangkan 'dunia internasional' dan tidak dimotori suatu motivasi murni dan penuh hati untuk mencari pemberian keadilan.

[7] rasa masuk jalan buntu

Kompleksitas perkembangan selama 3 ½ tahun terakhir ini serta dampaknya atas kehidupan masyarakat di Papua begitu besar dan berat,

hingga banyak orang merasa bahwa kita sudah masuki jalan buntu. Tidak tahu lagi mau buat apa? Mana ada titik-titik terang? Sejumlah orang memilih turut bermain saja hingga merasa aman, sejumlah orang pilih menyerah hingga menjadi penonton saja, sejumlah orang masih ingin mencari jalan, walau merasa akan mengalami banyak halangan dan frustrasi. Sambil menyadari dampak negatif yang begitu besar dari 'strategi penguasaan disertai kekerasan' yang mengantar kami memasuki 'jalan buntu', di bawah ini kami masih akan berefleksi atas perspektif-perspektif menuju suatu jalan keluar, menuju Papua Tanah Damai.

PERSPEKTIF KE DEPAN

Suasana yang tercipta, a.l. karena 'pendekatan keamanan' demi menyelesaikan konflik di Papua, kelihatan sangat suram. Seperti telah dicatat di atas, kebanyakan orang yang sangat peduli dengan perkembangan di Papua ini mulai kehilangan harapan dan semangat. Banyak yang pasrah saja, dan yang masih bersemangat berjuang supaya Papua menjadi "Papua Tanah Damai" turut makin putus asa.

Secara umum boleh dikatakan bahwa para pihak yang peduli makin yakin bahwa di Papua hanya masih dapat menikmati perdamaian kalau isi konflik sebenarnya dibuka secara jujur dan mendalam. Hanya, kalau semua pihak bersedia untuk duduk bersama dalam suatu suasana saling menghargai. Pendekatan keamanan sudah terbukti gagal total. Cenderung dari dua belah pihak untuk memutlakkan pendapatnya, yang terumus dalam pegangan "Papua Merdeka Harga Mati" dan "NKRI Harga Mati", sudah pasti tidak akan membawa damai, melainkan penderitaan melulu. Sejak awal 2000 selama sejumlah tahun ada semangat untuk memprakarsai suatu dialog yang sejati, namun semangat itu akhirnya hilang karena tidak didukung oleh suatu 'political will' yang benar-benar untuk menyelesaikan konflik Papua dengan martabat. Maka, akhirnya kita tembus pada 'suasana di mana kekerasan merajalela', 'suasana jalan buntu', yang sangat melumpuhkan segala semangat untuk bergerak bersama.

[1] Inisiatif dari Komnas HAM

Akhir-akhir ini ada suatu inisiatif yang diambil oleh Komnas HAM. Namun inisiatif ini cukup diragukan. Pertama-tama, Komnas HAM ternyata tidak diberikan suatu mandat resmi dari Presiden. Maka, inisiatif ini lebih merupakan suatu ambisi internal Komnas HAM daripada suatu gerakan resmi oleh negara. Kedua, sejumlah pihak menilai bahwa sampai saat ini Komnas HAM kurang membuktikan netralitas dan efektifitasnya. Banyak kasus pelanggaran HAM di Papua tidak diselesaikan semestinya, maka tidak memberikan keadilan kepada para kerabat dari korban-korban pelanggaran HAM itu. Ketiga, ada kesan bahwa gaya bergerak Komnas HAM agak diwarnai aspek ‘show off’, atau dengan kata lain: menunjukkan kepada Komunitas Nasional maupun Internasional bahwa Indonesia sudah menangani konflik di Papua dengan sangat serius. Keempat, dalam upayanya mencapai suatu ‘kesepakatan’, Komnas HAM juga kurang aktif untuk melibatkan pihak-pihak yang sebenarnya berwibawa di Papua untuk turut memikirkan penyelesaian konflik itu. Kelima, Komnas HAM sekali-kali memilih jalan pintas yang kurang benar dan mengklaim bahwa sudah berhasil. Contohnya: penandatanganan bersama MoU ‘Jeda Kemanusiaan’ (11 Nov 2022), yang sebenarnya tidak melibatkan kedua pihak yang paling menentukan dalam konflik bersenjata di Papua, TPNPB dan TNI-Polri. Pernyataan kesepakatan ‘jeda kemanusiaan’ itu dibanggakan dan diumumkan di Geneve. Pertanyaan sampingan saja: kenapa rapat-rapat menuju jeda kemanusiaan perlu diadakan di Jenewa, dan tidak dapat diadakan di Jayapura? Komnas HAM juga mengklaim bahwa sudah bertemu dengan ‘pimpinan TPNPB’. Pernyataan itu dibantah benarnya oleh pihak TPNPB, yang menjelaskan bahwa Komnas HAM bertemu dengan ‘pimpinan palsu’ (pimpinan binaan TNI), sehingga klaimnya menyesatkan. Dalam tanggapannya Komnas HAM menyatakan bahwa belum saatnya untuk membuka dalam detail mereka telah bertemu dengan siapa-siapa.

Pokoknya, gaya kerja Komnas HAM masih diragukan, dan malahan ada kesan bahwa kejadian sekitar kesepakatan ‘jeda kemanusiaan’

lebih merupakan suatu langkah mundur, karena kemungkinan besar pelaksanaannya akan gagal saja, karena pihak yang penting tidak terlibat dan tidak ada persiapan apapun di lapangan.⁴

Walau de facto Komnas HAM sampai saat ini kurang diberikan dukungan – dengan alasan yang disebut di atas – sebenarnya inisiatif dari Komnas HAM mungkin dapat kita semua pakai untuk mengawali suatu perubahan. Sebaiknya Komnas HAM meninggalkan ambisinya yang terlalu besar, dan bersama para pihak di Papua yang peduli mulai mencari jalan awal yang akhirnya dapat menuju suatu dialog. Dalam tahap awal itu, Komnas HAM perlu menjadi pendengar hingga mulai betul memahami kompleksitas konflik di Papua ini. Lantas bersama mitra-mitra di Papua dapat berfokus lebih dahulu pada ‘memulihkan kembali suasana di Papua, yakni ‘keluar dari jalan buntu’. Mengubah suasana sebagaimana digambarkan di atas, sudah menjadi persyaratan mutlak untuk memikirkan suatu dialog yang betul bersubstansi.

[2] perlu banting stir

Dari awal mula kami dapat mencatat bahwa dengan perkembangan selama 3 ½ tahun terakhir ini, kita sudah mengalami suatu langkah kemunduran yang sangat besar dalam proses penyelesaian konflik di Papua ini. Kesadaran itu berarti bahwa kita semua perlu mengakui bahwa pendekatan keamanan yang sampai sekarang ini diunggulkan telah gagal total, dilihat dari sudut penyelesaian konflik di Papua. Pengakuan demikian adalah langkah pertama menuju suatu ‘keterbukaan menuju penyelesaian konflik’. Maka, hal pertama yang kita butuhkan, adalah: kesediaan – political will - untuk banting stir!

[3] penyelesaian konflik di Papua

4 “Jeda Kemanusiaan” yang disepakati di Geneva antara Komnas HAM, ULMWP dan MRP, sebenarnya sangat terbatas lingkungannya baik secara geografis, secara waktu berlakunya maupun secara sasarannya. Jeda Kemanusiaan ini hanya akan diberlakukan untuk wilayah konflik Maybrat saja, akan berlaku dari 10 Desember 2022 sampai 10 Februari 2023 (2 bulan saja) dan bertujuan untuk memberikan kesempatan aman untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi dan mengajak mereka untuk pulang kampung. .

bertahap dua

Menuju suatu dialog dan/atau menuju penyelesaian konflik di Papua, kita akan menghadapi dua tahap yang agak berbeda, namun yang saling melengkapi, yakni: [a] Tahap pertama: [a] Bagaimana menghilangkan dampak negatif dari perkembangan selama 3 ½ tahun terakhir ini? Dan [b] Tahap kedua: Bagaimana kembali pada jalur yang benar, yakni suatu dialog berdasarkan suatu uraian benar akar-akar utama konflik di Papua? Hasil tahap pertama sebenarnya merupakan persiapan medan, tanah yang subur untuk masuki tahap kedua.

USULAN AGENDA DAMAI KE DEPAN

[1] memulihkan hak-hak dasar, kepercayaan dan harapan

Untuk menyiapkan medan yang memungkinkan suatu dialog di kemudian hari, kita semua dipanggil untuk turut memulihkan terlebih dahulu suasana yang suram hingga menjadi lebih terang. Dalam proses pemulihan ini sejumlah aspek perlu diberikan perhatian sangat serius, antara lain aspek-aspek sbb: Menahan diri sampai pemberhentian segala bentuk kekerasan bersifat kontak senjata; jeda kemanusiaan dalam arti luas, Pemberhentian proses militarisasi wilayah Papua; penarikan banyak pasukan dari Papua, Memulihkan kembali hak konstitusional kebebasan pengungkapan pendapat sepenuh-penuhnya, Menghentikan segala bentuk stigmatisasi' stop segala kampanye yang menyesatkan, Menciptakan ruang untuk informasi yang tepat dan benar; Membuka Papua untuk para wartawan (nasional maupun internasional) dan bagi Rapporteur Khusus PBB; Memberlakukan semua orang sama di depan hukum; dari 'negara penguasaan' di Papua, Pemerintah Pusat perlu beralih kembali pada 'negara hukum'; Melindungi para aktivis yang memperjuangkan HAM dan pengindahan martabat setiap manusia; Menunda pelaksanaan rencana DOB; dan memulihkan Otonomi di Papua; dan Mengendalikan masuknya jumlah besar migran

[2] Agenda kerja

Daftar aspek tadi – masih dapat dilengkapi - bisa menjadi suatu agenda kerja awal. Kita semua perlu suatu “jeda kemanusiaan” bukan saja berkaitan dengan nasibnya para pengungsi, namun supaya sebagai masyarakat pada umumnya kita dapat bernafas lagi dengan santai dan tenang. Suasana tanpa ancaman kami inginkan untuk melihat segala masalah yang ada, karena bukan sedikit (lihat daftar saja). Pemulihan suasana bisa dijadikan agenda kerja awal bukan saja untuk Komnas HAM namun juga bagi semua lembaga yang peduli di Papua, termasuk, dan mungkin malahan secara khusus lembaga-lembaga keagamaan. Yang kita membutuhkan sekarang ini adalah suatu ‘dapur’ dimana sejumlah ‘koki’ dari pelbagai organisasi bekerja sama dengan satu tujuan saja: menyelesaikan konflik di Papua dengan damai dan bermartabat. Dalam dapur itu disusun kembali suatu ‘roadmap menuju Papua Tanah Damai’. Bagian awal dari ‘roadmap’ itu adalah: memulihkan kembali sejumlah hak dasar serta kepercayaan dan harapan.

[3] ‘political will’ dan tanggung jawaban bersama

Penyelesaian konflik bukan lagi pertanggungjawaban saja pemerintah pusat, namun tanggung jawab kita bersama. “Political will yang sejati” memang perlu ditunjukkan oleh semua pihak, secara khusus Pemerintah Pusat serta jawatan nya. Pemerintah perlu memberikan suatu mandat (sebagai ungkapan political will nya) yang berarti pada para mitra kerjanya di Papua untuk memulihkan kembali suasana hidup yang aman dan tenang dimana tidak ada tempat untuk diskriminasi, marginalisasi, stigmatisasi, kriminalisasi, dan di mana hak-hak serta martabat setiap orang diakui sepenuhnya.

[4] Tahap pertama ini perlu dijalankan dengan segera

Seandainya situasi di Papua sekarang ini tidak diubah dengan segera, makin banyak pemantau berpendapat bahwa situasi akan berkembang ke arah lebih kejam lagi. Pemakaian kekerasan baik dari pihak pejuang hak penentuan nasib sendiri

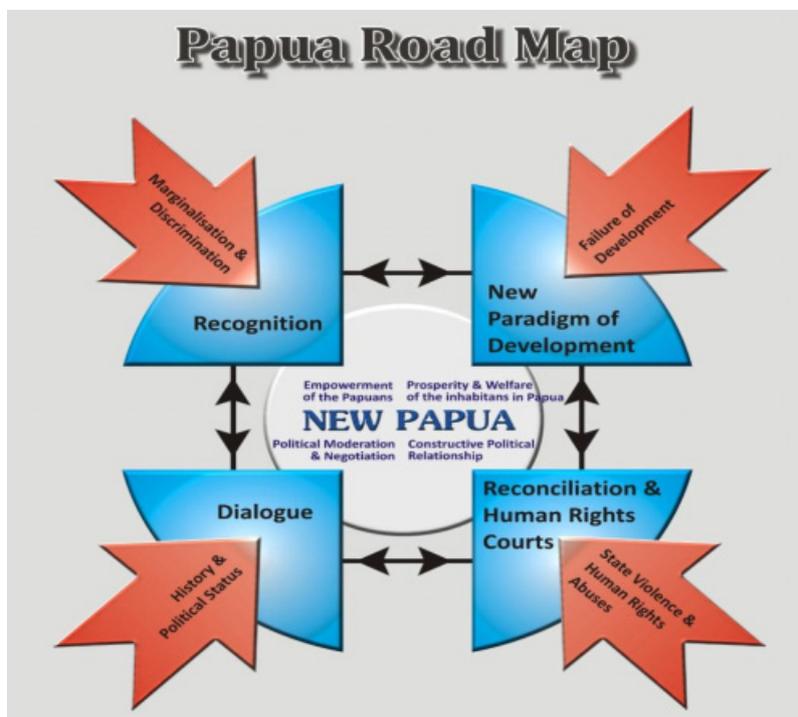
maupun dari pihak keamanan akan meningkat. Kekacauan makin massal dan makin banyak korban akan jatuh di Bumi Cenderawasih yang indah ini. Dalam suatu laporan yang berjudul “JANGAN ABAIKAN KAMI” mencegah kekejaman massal di Papua, Indonesia yang diterbitkan oleh “Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide” diberikan suatu analisa mengenai situasi di Papua. Analisa itu dilengkapi dengan gambaran scenario-scenario kekejaman yang kemungkinan besar akan muncul selama setahun sampai satu setengah tahun ke depan (Supriatma, 2022). Berikut ini adalah tahap kedua

[5] memasuki medan sensitif: ‘saling mengakui’

Sekali keluar dari ‘suasana jalan buntu’ sebagaimana digambarkan dalam proses tahap pertama, kita akan memiliki ruang secukupnya untuk memberikan perhatian penuh pada dialog serta substansinya. Sudah tentu, hal pertama yang perlu dijawab dalam tahap kedua ini, adalah: *akar-akar konflik di Papua sebenarnya apa?* Menjawab pertanyaan itu kita akan menyadari bahwa salah satu kesulitan terbesar kita adalah

bahwa sampai saat ini kita tidak memiliki suatu konsensus mengenai substansi konflik itu. Bertanya kepada pemerintah Indonesia, mana akar permasalahan di Papua?, jawabannya akan berkisar masalah ekonomi, kesejahteraan dan jati diri orang/bangsa Papua. Sedangkan kalau bertanya pada LIPI (sekarang BRIN), mereka akan tunjuk pada penelitian di mana ditemukan bahwa ada empat akar utama: [a] diskriminasi/marginalisasi, [b] pola pembangunan yang kurang tepat, [c] sejarah dan status politik, dan [d] pelanggaran HAM. Bertanya pada Orang Asli Papua: jawabannya adalah sekitar sejarah pengintegrasian ke dalam republik Indonesia, sejarah penyangkalan hak dasarnya sebagai bangsa dari dulu sampai saat ini.

Sudah tentu, memulai suatu dialog tanpa suatu pemahaman konflik yang sama, hanya dapat menghasilkan suatu suasana main-main saja, dan tidak akan berakhir dengan suatu solusi yang dapat dibanggakan. Suatu konsensus pemahaman bersama mutlak dibutuhkan kalau kita mau berdialog secara benar. Sampai hari ini masih sangat sulit untuk mencapai konsensus ini. Aspek yang paling mengganggu adalah aspek politik yang dasariah yang terungkap dalam



Gambar 1 Papua Road Map. Sumber: Widjojo dkk., (2010).

catatan orang asli Papua dan yang sudah tercatat juga dalam pemahaman LIPI dimana sejarah dan status politik disinggung.

PERSPEKTIF ORANG ASLI PAPUA

[1] Perspektifnya Orang Asli Papua

Mengingat bahwa dalam tulisan ini kami menyoroti situasi di Papua secara khusus dari sudut pandang orang asli Papua, alangkah baiknya kami juga mencoba untuk menjelaskan akar utama sebagaimana diangkat oleh “anak-anak sulung Papua”. *Akar permasalahan di Papua sebenarnya tidak lain daripada pengalaman pahit para penduduk asli Papua sewaktu mereka mengalami bahwa tanahnya serta habitatnya begitu saja dituntut orang lain.* Pengalaman pahit ini mulai dengan segala bentuk penjajahan yang mereka alami sejak kedatangan orang Belanda yang mulai menduduki Papua. Tanah leluhur mereka dirampas menjadi hak milik para penjajah dan sumber daya alamnya dirampas dan dijadikan sumber kekayaan para penjajah. Kehadiran bangsa Papua sebagai pemilik tanah itu tidak diakui dan martabatnya diremehkan, dinilai di bawah standard keadaban. Tindakan demikian atas dasar apa? Orang Belanda mungkin merasa lebih berhak karena kulit putihnya dan/atau merasa lebih pintar/superior? Mereka berpikir bahwa tanah itu kosong? Para penduduk seakan-akan tidak perlu dipedulikan; kenapa demikian? Pengalaman pahit ini adalah akar segala masalah di Papua sampai saat ini. Pengalaman pahit ini berkelanjutan selama masa mengadministrasi pemerintah Belanda maupun selama masa mengadministrasi pemerintah Indonesia.

Bukan saja bangsa Papua yang melalui pengalaman yang sangat pahit itu. Ada banyak contoh sejenisnya. Diantarnya contoh di tetangganya Australia, di mana bangsa Aborigines digeser dari kedudukannya sebagai pemilik otentik tanahnya oleh 'para pendatang'. Dan contoh lain di Selandia Baru di mana nasibnya bangsa Maori sama. Atau contoh para bangsa Indian di Amerika dan Kanada yang mencatat sejarah pahit yang sama. Hanya perlahan-lahan

saja, selama dekade-dekade yang terakhir ini, 'dosa besar' di masa lampau mulai disadari dan diakui para 'kekuatan penjajah tempo dulu'. Kenyataan itu sekarang ramai terungkap dengan 'meminta maaf atas dosa masa yang lampau'. Contoh yang paling baru adalah 'perjalanan berziarah pertobatan' Bapak Paus Fransiskus yang ke Kanada untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada para bangsa Indian di Kanada itu. Juga penjajah Belanda meminta maaf kepada Indonesia atas 'tindakan penjajahan yang penuh kekerasan' selama 1940-an. Perlahan-lahan semua 'kekuatan penjajahan' mulai sadar dan menarik pelajaran dari sejarah yang sangat menyedihkan dan sangat tidak manusiawi itu.

[2] Suatu pengalaman yang tidak asing bagi bangsa Indonesia.

Melihat konteks konflik di Papua, sebenarnya sulit dimengerti bahwa Indonesia sendiri, yang telah melalui pengalaman pahit yang sama, kurang memanfaatkan pelajaran dari sejarahnya sendiri dalam proses menentukan kebijakan pemerintahan dewasa ini. Indonesia sendiri berjuang secara heroik/pahlawan melawan para penjajah dalam tahun 1940-an, karena merasa identitas dan martabatnya tidak diakui, malahan diinjak oleh para penjajah Belanda dan Jepang. Kenapa pengalaman ini tidak dibawa serta dalam kebijakan sekarang selaku 'negara merdeka', 'Indonesia Merdeka' terhadap bangsa Papua hari ini? Pada masa kini bangsa Papua mengalami hal yang sama seperti Indonesia hampir seabad lalu. Mereka pun merasa tidak diakui dan identitas serta martabatnya diinjak. Tanah milik mereka didatangi 'orang luar', dalam hal ini juga orang Indonesia, dan dirampasnya seakan-akan para 'tamu ini' merasa lebih berhak memilikinya. Lebih berhak karena apa? Karena mereka lebih pintar? atau, karena warna kulit lebih cerah? atau, karena mereka menilai bahwa hasil PEPERA⁵

5 PEPERA (pemungutan pendapat rakyat) adalah referendum buat bangsa papua untuk menyatakan apakah mereka ingin bergabung dengan Republik Indonesia atau tidak. Pemerintah Indonesia diwajibkan melalui ketentuan dalam *New York Agreement (15 Agustus 1962)* - yang mengatur pengalihan administrasi pemerintahan dari Belanda kepada pemerintah Indonesia – untuk menyelenggarakan referendum berlandaskan prinsip '*one man, one vote*' ini paling lambat tahun 1969. Indonesia

memenuhi standar nilai keadilan yang sejati? Kita semua tahu dan bisa menyadari bahwa PEPERA 1969 merupakan suatu proses yang menolak segala partisipasi bebas oleh bangsa Papua secara sistematis dan terstruktur, sehingga PEPERA ini sangat bercacat hukum. Kenyataan demikian juga disadari oleh Rapat Paripurna PBB sewaktu mereka 'meng-arsip-kan' hasil PEPERA sebagai 'sudah dicatat' (has taken note), namun mereka sangat menghindari untuk menyatakan secara terang benderang bahwa mereka menilai hasil PEPERA sebagai hasil sah ungkapan pendapat bangsa Papua. Pokoknya, sudah tentu, malahan dalam pelaksanaan proses demokratis pengungkapan pendapat, ternyata 'hak anak sulung Papua' disangkal, dan martabatnya sangat diremehkan.

[3] tindakan politik tahun 2020-2022

Dewasa ini 'suasana tidak diakui identitas serta martabatnya' masih sangat terasa oleh orang asli Papua. Secara khusus dalam seluruh proses seperti pengesahan baik UU Otsus Jilid II maupun UU DOB Papua. Seperti dulu, semuanya diselenggarakan tanpa mendengar suara ratusan ribu orang Papua. Hak mengungkapkan pendapatnya secara damai dihilangkan secara efektif dengan membubarkan paksa segala demo. Malahan selama tahap persiapan demo, para penyelenggara dan relawan (seperti penyebar lembar undangan demo) sudah ditangkap dan dibawa ke markas kepolisian untuk diinterogasi dan diintimidasi. Keterbukaan di tingkat Pemerintah Pusat untuk menjauhkan diri dari strategi penguasaan sampai saat ini belum ada, dan kenyataan demikian mempunyai dampak besar atas situasi Papua anno 2022 ini. Di situlah masalah dan akar utama konflik Papua, dan konflik demikian tidak pernah dapat diselesaikan dengan layak melalui suatu pendekatan penguasaan.

[4] Tidak ada dialog yang berarti kalau tidak membahas aspek politik konflik Papua!

meninggalkan priniip itu dan secara sepihak menyeleksi dan mengarahkan 1026 warga Papua saja guna memastikan bahwa mereka untuk 100% memilih pengintegrasian kedalam Republik Indonesia.

Dengan kata lain, hanya suatu dialog terbuka yang memberikan tempat sewajarnya pada 'aspek politik' yang digambarkan di atas, ada peluang untuk berhasil. Suatu dialog yang ditandai pengakuan akan martabat setiap orang, saling mendengar dan saling menghargai, bisa membersihkan jalan menuju suatu solusi yang dapat dibanggakan. Dengan menyadari bahwa sampai saat ini 'masalah utama' yang memang bersifat suatu 'masalah politik' kurang diberikan prioritas dalam mencari suatu solusi untuk konflik di Papua, bisa ada harapan bahwa akhirnya Pemerintah akan membanting stir. Langkah kunci itu akan dapat dukungan, bukan saja dari warga-warga di Papua. Namun juga dukungan dari warga Indonesia yang sudah menjadi sadar bahwa permasalahannya di Papua, bukan sesuatu yang dibuat oleh orang asli Papua, melainkan merupakan suatu masalah yang diciptakan oleh sejarahnya bersama Indonesia. Inilah suatu masalah 'buatan manusia' dan solusinya juga mesti bersifat 'buatan manusia'. Buatan Manusia yang sadar dan sama-sama yakin bahwa kita ada di dunia ini untuk menciptakan ruang dan keramahan satu bagi yang lain yang sehak hidup, seharga dan semartabat.

PENUTUP

Kami sangat tertarik dengan catatan seorang Mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Hamid Awaludin, dalam opininya yang diterbitkan Kompas (Awaluddin, 5 Januari 2023), berjudul 'Jeda Kemanusiaan di Papua', di mana beliau mencatat: "Bagaimana kelanjutan ikhtiar perdamaian di Papua? Dalam konflik domestik yang bersifat vertikal di mana pun, termasuk di Aceh, pemerintah memang seharusnya selalu mengambil inisiatif untuk memulai mencari jalan mewujudkan perdamaian. Tentu sebagian orang menganggap mengambil inisiatif berarti pemerintah mengalah kepada kelompok perlawanan. Mengambil inisiatif justru ingin memenangi pertempuran, yakni mewujudkan perdamaian. Ujung sebuah perang adalah damai. Perspektif ini sebaiknya pemerintah pegang menyikapi Papua. Ego harus disisihkan". Oleh karena itu, kita semua perlu berani demi kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2020, November). Amnesty International And The Alliance of Independent Journalists. Report Submission To The 41st Session Of The UPR Working Group
- Awaluddin, H. (2023, 5 Januari). 'Jeda kemanusiaan di Papua. Opini Harian Kompas halaman 7. Diakses dari [Jeda Kemanusiaan di Papua - Kompas.id](https://www.kompas.id) pada 7 Januari 2023.
- Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC). (2021). Diminished Autonomy and The Risk of New Flashpoints in Papua. IPAC Report No. 77. Jakarta: IPAC.
- IPAC. (2022). Escalating Armed Conflict and a New Security Approach in Papua. Jakarta: IPAC.
- Komnas HAM Duga Tersangka Mutilasi di Mimika Lakukan Aksinya Lebih Dari Sekali.' (2022, 20 September). Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1636481/komnas-ham-duga-tersangka-mutilasi-di-mimika-lakukan-aksinya-lebih-dari-sekali> pada 2 Desember 2022.
- Rakhman, O., Ma'rafuh, U, Kausan, B.Y & Ardi. (2021). Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya. Jakarta: #BersihkanIndonesia, YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentara Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia.
- Sekretariat Negara. (2022, 26 Agustus). Keppres No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.
- Supriatma, MT (2022, 19 Juli). "Don't Abandon Us": Preventing Mass Atrocities in Papua, Indonesia. Washington DC: The Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide United States Holocaust Memorial Museum.
- van den Broek, T. (2020). TUNTUT MARTABAT, ORANG PAPUA DIHUKUM, Potret Politik Rasialisme di Tanah Papua 2019. Seri Memoria Passionis No. 38. Jayapura: Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua.
- Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2010). Papua road map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

[iew.hks.harvard.edu/article/a-pro-government-disinformation-campaign-on-indonesian-papua](https://www.hks.harvard.edu/article/a-pro-government-disinformation-campaign-on-indonesian-papua) pada 2 Desember 2022.

Sumber Internet:

- 'A pro-government disinformation campaign on Indonesian Papua.' (2022, 19 Oktober). hks.harvard.edu. Diakses dari <https://misinfoforev->